

POINTER
BAHAN RAPAT DENGAR PENDAPAT (*HEARING*)
PEMBAHASAN LKPJ KEPALA DAERAH PROVINSI LAMPUNG.
INSPEKTORAT PROVINSI LAMPUNG

I. RENSTRA INSPEKTORAT PROVINSI LAMPUNG 2019-2024

Memperhatikan Visi Pemerintah Provinsi Lampung “**Rakyat Lampung Berjaya**” dan Enam Misi yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 yaitu :

1. Menciptakan kehidupan yang religius (agamis), berbudaya, aman dan damai;
2. Mewujudkan “*good governance*” untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan publik;
3. Mengembangkan upaya perlindungan anak, pemberdayaan perempuan dan kaum difabel;
4. Mengembangkan infrastruktur guna meningkatkan efisiensi produksi dan konektivitas wilayah;
5. Membangun kekuatan ekonomi masyarakat berbasis pertanian dan wilayah perdesaan yang seimbang dengan wilayah perkotaan;
6. Mewujudkan pembangunan daerah berkelanjutan untuk kesejahteraan bersama.

maka tugas dan fungsi serta kedudukan Inspektorat Provinsi Lampung selaku unsur Penunjang Kepala Daerah di bidang pembinaan dan pengawasan adalah mewujudkan *good governance* untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan publik. Hal ini selaras dengan misi ke-2 (dua) dalam Dokumen RPJMD Provinsi Lampung yaitu “Mewujudkan *good governance* untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan publik”.

Dalam Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Provinsi Lampung periode 2019 – 2024, tujuan yang ingin dicapai oleh Inspektorat Provinsi Lampung adalah :

“Meningkatkan Akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas kinerja melalui peningkatan pembinaan dan pengawasan.” dengan sasaran “Meningkatnya Kinerja Keuangan berdasarkan hasil pemeriksaan BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah melalui peningkatan pembinaan dan pengawasan.”

II. REALISASI INSPEKTORAT TAHUN 2020

1. Inspektorat Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020 mendapat Alokasi Dana sebagai berikut :
 - a) Belanja Tidak Langsung : **Rp.25.048.260.124,-**
 - b) Belanja Langsung : **Rp.8.688.297.100,-**

2. Realisasi Belanja Inspektorat Provinsi Lampung untuk Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut :
 - a. Pagu Anggaran Total Rp. 33.736.557.224,-, Realisasi Rp. 30.021.083.121,- **(88,99%)**
 - b. Belanja Tidak Langsung dengan jumlah Anggaran sebesar Rp.25.048.260.124,- terealisasi sebesar Rp. 24.654.498.728,- / **98.43 %**
 - c. Belanja Langsung, jumlah Anggaran sebesar Rp. 8.688.297.100,- terealisasi sebesar Rp.5.366.584.393,- / **61.77 %**
3. Pada Belanja Langsung terdapat 7 (tujuh) Program dan 33 (Tiga puluh tiga) Kegiatan. Adapun 7 (Tujuh) Program tersebut adalah :
 - a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
 - b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
 - c. Program Perencanaan,Evaluasi dan Keuangan ,Serta Asset Perangkat Daerah
 - d. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan (KDH);
 - e. Program Peningkatan Koordinasi dan Sinergi Pengawasan;
 - f. Program Peningkatan Sistem Prosedur Pengawasan pada Obyek Pengawasan;
 - g. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;

Rincian realisasi Anggaran untuk masing-masing program tersebut diantaranya :

No.	Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase realisasi dari pagu
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2,316,029,500	1,590,017,918	68.65
2	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Apartur	544,260,900	539,640,275	99.59
3	Program Perencanaan, Evaluasi Dan Keuangan, Serta Asset Perangkat Daerah	11,500,000	10,534,000	91.60
4	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	4,129,208,100	2,509,992,100	60.79
5	Program Peningkatan Koordinasi Dan Sinergitas Pengawasan	1,009,069,600	252,275,100	25.00
6	Program Peningkatan Sistem Pembinaan Dan Prosedur Pengawasan Pada Obyek Pengawasan	512,978,000	374,259,000	56.61
7	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	165,251,000	89,866,000	54.38

4. Untuk Rincian Realisasi Kinerja Inspektorat Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut :
 - A. **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**
 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, terdiri dari 10 (sepuluh) kegiatan dengan realisasi kinerja terdiri dari :

- 1) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dengan realisasi penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik kantor selama 12 Bulan;
- 2) Penyediaan jasa administrasi keuangan dengan Realisasi layanan Administrasi Keuangan selama 12 bulan;
- 3) Penyediaan alat tulis kantor dengan Realisasi penyediaan Alat Tulis kantor Selama 12 Bulan;
- 4) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan dengan Realisasi penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan selama 12 bulan;
- 5) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan realisasi Jumlah Pengadaan Peralatan kantor (komputer, laptop, Printer, Meja, Kursi dll) sebanyak 112 unit;
- 6) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor dengan Realisasi tersedianya Kebutuhan Peralatan Rumah Tangga dan Peralatan Listrik selama 12 bulan;
- 7) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan dengan Realisasi penyediaan Kebutuhan Bacaan dan peraturan Perundang-undangan selama 12 bulan;
- 8) Penyediaan Makanan dan Minuman dengan realisasi Kebutuhan Makan Minum Rapat sebanyak 24 kali;
- 9) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dengan Realisasi Menghadiri Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi sebanyak 35 kali;
- 10) Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran dengan Realisasi Periode Pembayaran Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran selama 12 bulan;

B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, terdiri dari 3 (tiga) kegiatan dengan realisasi Kinerja sebagai berikut :

- 1) Pemeliharaan rutin/berkala Gedung kantor dengan realisasi Terpeliharanya Gedung kantor Inspektorat Provinsi Lampung sebanyak 4 paket.
- 2) Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas /Operasional Realisasi kinerja pelaksanaan pemeliharaan 13 Unit Kendaraan dinas Inspektorat.
- 3) Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor Dengan Realisasi Jumlah Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor sebanyak 213 unit.

C. Program Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan, serta asset Perangkat Daerah,

Program Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan, serta aset Perangkat Daerah, terdiri dari 2 (dua) kegiatan dengan realisasi Kinerja :

- 1) Tersusunnya Dokumen Pelaporan dan Evaluasi Kinerja dengan realisasi sebanyak 6 dokumen.
- 2) Penyusunan dokumen perencanaan dengan realisasi tersusunnya Jumlah Dokumen Perencanaan sebanyak 5 dokumen.

D. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah, terdiri dari 12 (dua belas) kegiatan dengan realisasi Kinerja sebagai berikut :

- 1) Terlaksananya Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan APIP di Provinsi Lampung dengan capaian realisasi Persentase Hasil Temuan Yang terselesaikan (82%)
 - 2) Pelaksanaan Pengawasan Supervisi/Monitoring Internal Secara Berkala Irban Wilayah I dengan realisasi Jumlah laporan Hasil Pengawasan berkala sebanyak 3 laporan.
 - 3) Pelaksanaan Pengawasan Supervisi/Monitoring Internal Secara Berkala Irban Wilayah II dengan realisasi Jumlah laporan Hasil Pengawasan berkala sebanyak 4 laporan.
 - 4) Pelaksanaan Pengawasan Supervisi/Monitoring Internal Secara Berkala Irban Wilayah III dengan realisasi Jumlah laporan Hasil Pengawasan berkala sebanyak 4 laporan.
 - 5) Pelaksanaan Pengawasan Supervisi/Monitoring Internal Secara Berkala Irban Wilayah IV dengan realisasi Jumlah laporan Hasil Pengawasan berkala sebanyak 4 laporan.
 - 6) Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah (Reguler) Irban Wilayah I dengan realisasi kinerja Jumlah laporan Hasil Pengawasan sebanyak 15 laporan.
 - 7) Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah (Reguler) Irban Wilayah II dengan realisasi kinerja Jumlah laporan Hasil Pengawasan sebanyak 15 laporan.
 - 8) Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah (Reguler) Irban Wilayah III dengan realisasi kinerja Jumlah laporan Hasil Pengawasan sebanyak 15 laporan.
 - 9) Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah (Reguler) Irban Wilayah IV dengan realisasi kinerja Jumlah laporan Hasil Pengawasan sebanyak 15 laporan.
 - 10) Terlaksananya Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah terhadap 15 Kabupaten/kota, pelaksanaan dilakukan bersama antara Inspektorat Provinsi, BPKP Perwakilan Provinsi Lampung, Biro Otonomi Daerah serta instansi lainnya dengan realisasi 15 laporan EPPD Kabupaten/Kota.
 - 11) Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kabupaten/Kota **pada tahun 2020**, evaluasi SAKIP diambil alih langsung oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi secara daring dikarenakan masa Pandemi Covid-19.
 - 12) Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintahan Daerah dengan realisasi kinerja Jumlah Kasus Pengaduan Masyarakat yang masuk sebanyak 123 pengaduan dan yang terselesaikan sebanyak 123 kasus sehingga persentase yang terselesaikan mencapai 100 %.
- E. Program Peningkatan Koordinasi dan Sinergitas Pengawasan**, terdiri dari 2 (dua) kegiatan dengan realisasi Kinerja sebagai berikut :
- 1) Peningkatan Koordinasi dan Penyusunan Program Kerja Pengawasan yang Komprehensif dengan realisasi Tersusunnya dokumen Jadwal Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) 2021.
 - 2) Peningkatan Koordinasi dan Pendampingan dalam mewujudkan Sinergitas Pengawasan, dengan realisasi Terlaksananya sosialisasi, koordinasi Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Saber Provinsi Lampung bersama Pihak Polda Lampung dan Kejaksaan Tinggi Lampung sebanyak 1 Kali.

F. Program Peningkatan Sistem Pembinaan dan Prosedur Pengawasan Pada Obyek Pengawasan, terdiri dari 3 (tiga) kegiatan dengan rincian realisasi Kinerja :

- 1) Kegiatan Pembinaan dan Monitoring Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dengan realisasi Terlaksananya Pembinaan dan Monitoring Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Provinsi Lampung sebanyak 1 kali;
- 2) Peningkatan Pembinaan dan Monitoring Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dengan realisasi Jumlah Pembinaan dan Monitoring Reformasi Birokrasi sebanyak 1 kali.
- 3) Pembinaan Gratifikasi dan Rencana Aksi Pencegahan Korupsi dengan realisasi Jumlah monitoring dan evaluasi pencegahan Korupsi sebanyak 3 kali.

G. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, terdiri dari 1 (satu) kegiatan yakni Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal dengan realisasi Jumlah Aparatur Sipil Negara Yang Mengikuti Diklat sebanyak 10 orang terkait Pelaksanaan Bimtek, Diklat dalam rangka peningkatan kapasitas APIP

III. HAMBATAN dan UPAYA DALAM MENGATASI HAMBATAN

Hambatan :

Pada saat awal kemuculan pandemi Covid-19 di Indonesia, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) telah mengeluarkan Surat Edaran pemberlakuan *Work From Home* (WFH) atau bekerja dari rumah bagi ASN yang kurang lebih berjalan selama 3 bulan (Maret s.d Mei). Pemerintah Provinsi Lampung juga memberlakukan sistem kerja dari rumah (WFH) bagi ASN lingkup Pemerintah Provinsi Lampung, termasuk para ASN di lingkungan Inspektorat Provinsi Lampung selaku Aparat Pengawasan Internal Pemerintah.

Adapun beberapa hambatan terkait pelaksanaan tugas-tugas yang cukup berpengaruh terhadap tingkat produktivitas dan efektivitas kinerja Inspektorat Provinsi Lampung antara lain :

- 1) Kebijakan refocussing anggaran pengawasan Tahun Anggaran 2020 yang dialihkan untuk anggaran percepatan penanganan Covid-19 di Provinsi Lampung;
- 2) Melakukan Pembatasan Perjalanan Dinas baik Durasi maupun personil dalam pelaksanaan Pengawasan dikarenakan kebijakan Work From Home dan adaptasi kebiasaan baru (New Normal) di Masa Pandemi, sehingga membatasi tugas-tugas pengawasan on visit site.

Upaya Mengatasi Hambatan :

- 1) Inspektorat Provinsi Lampung selaku Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung tetap dapat melaksanakan Tugas-tugas pengawasan selama masa pandemi, baik pada saat penerapan WFH maupun WFO (New Normal) dengan mengedepankan efisiensi dan Efektivitas Penggunaan Anggaran serta membatasi kegiatan kunjungan ke objek pemeriksaan.
- 2) Dalam pelaksanaan Tupoksi APIP tersebut, tetap memperhatikan protokol kesehatan bekerja di kantor selama masa pandemi Covid-19.

Bandar Lampung, Mei 2021

INSPEKTUR



Ir. FREDY SM. M.M

Pembina Utama Madya

NIP.19650202 199010 1 001